

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MUSI ARTA LESTARI

JI. Kapasan No. 18 Tegalrejo Telp. (0735) 450493 - 450292 Fax: (0735) 450493 email:bprmalsekr@yahoo.com BELITANG - OGAN KOMERING ULU TIMUR

Belitang, 24 Mei 2021

Nomor

1050 /BPR-MAL/V - 121 /2021

Lampiran

1 (satu) berkas

Kepada Yth,

Pimpinan OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

KR 7 Sumatera Bagian Selatan

Di

Jl. Residen H. Abdul Rozak No.99

PALEMBANG 30114

Perihal: Laporan Tata Kelola dan Self Assesment PT. BPR Musi Arta Lestari Tahun 2020

Dengan Hormat,

Mohon diterima

Jumlah	Conten		Keterangan
1 (satu) exp	Laporan Tata Kelola PT. BPR LESTARI tahun 2020	MUSI ARTA	
1 (satu) exp	Laporan Self Assesment PT. BPR LESTARI tahun 2020	MUSI ARTA	laman web dengan alamat www.bprmal.com

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR MESI ARTA LESTARI
Belitang-OKU Timur

AHMAD SHOIM
Direktur Utama

Cc/

- Dewan Komisaris PT. BPR Musi Arta Lestari di Belitang-OKU Timur
- Arsip





PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MUSIARTA LESTARI



Jl. Kapasan 18 Tegalrejo Kec. Belitang Kab. OKU Timur p/f 0735 450493 e bprmalsekr@yahoo.com post 32382

Belitang, 25 Mei 2021

Nomor

1071 /BPR-MAL/V - 142 /2021

Lampiran

1 (satu) berkas

Kepada Yth,

1. KETUA UMUM DPP PERBARINDO

PIMRED MEDIA BPR

D

KOMP. PATRA II NO. 46 Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass RT.15/RW.3, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih DKI Jakarta

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

10510

Perihal: Laporan Tata Kelola PT. BPR Musi Arta Lestari Tahun 2020

Dengan Hormat,

Mohon diterima

Jumlah	C	Conten		
1 (satu) exp	Laporan Tata Kelola LESTARI tahun 2020	PT. BPR MUSI ARTA	Telah kami muat dalam laman web dengan alamat www.bprmal.com	

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Cc/

- Dewan Komisaris PT. BPR Musi Arta Lestari di Belitang-OKU Timur
- 2. Arsip

PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari, setelah membaca dan mengevaluasi laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari, yang telah disusun oleh Direktur Utama bersama dengan Pejabat Eksekutif membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.3/2015 serta Surat Edaran Oioriias Jasa Keuangan, maka dengan ini kami memberikan persetujuan laporan atas pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari. Untuk selanjutnya laporan ini dapat disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan *Good* Corporafe *Gavernance* atau tata kelola di PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

DEWAN KOMISARI
PT Bank Perkreditan Rakyat

Musi Arta Lestari

MOMISARI

JOKO DWI PURNOMO YOHANES SPELITANG

Komisaris Utama

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MUSI ARTA LESTARI

TAHUN 2020

PENGANTAR

Ditengah merebaknya *covid 19* yang berkembang menjadi pendemi memaksa masyarakat yang terdampak untuk lebih berhati-hati dan menahan diri untuk tetap didalam rumah dan mengurangi aktifitas diluar hal ini akibat dari kebijakan pemerintah yang diambil yaitu PSBB dan yang paling terdampak adalah sektor UMKM sehingga kondisi ekonomi semakin sulit. Kebijakan lain adalah pemberian bansos namun hal ini juga dampaknya belum terasa.

Program relaksasi yang diluncurkan oleh OJK dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 juga adanya subsidi bunga oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia membantu debitur ditengah kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh debitur.

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance (GCG)* pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika *(code of conduct)* yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Tujuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* di PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari

- 1. Mengelola sumber daya Bank supaya lebih amanah
- 2. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank
- 3. Membuat Bank menjadi lebih tumbuh ke arah yang lebih baik lagi

- 4. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada *Stakeholders*
- 5. Menciptakan budaya taat aturan

A. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris

a. Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Dewan Komisaris yang berjumlah 2 (dua) orang. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris di pimpin oleh Komisaris Utama.

b. Komposisi masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut,

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Joko Dwipurnomo J, S.Pd

Komisaris : Chandra Kesuma, SE

Direksi

Direktur Utama : Ahmad Shoim, SE

Direktur : Sri Kusmiyati, SE

c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi					
1	Nama	:	Ahmad Shoim, SE			
	NIK*)	:	1608062606790001			
	Jabatan	:	Direktur Utama			
	Tugas dan Tanggung Jawab					
	b. Mengelola BPR se sebagaimana diatu perundang-undang 1) Menghimpun 2) Menyalurkan 3) Menempatka 4) Menerima pe 5) Menerima pi	suai ur d gan, a dar krec n da nem njam	na;			

c.	Menerapkan Tata Kelola p	ada setiap	kegiatan	usaha	BPR di	seluruh
	tingkatan atau jenjang org	janisasi.				

- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

2 Nama : Sri Kusmiyati, SE

NIK*) : 1608066906680001

Jabatan : Direktur

Tugas dan Tanggung Jawab

- 1. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR.
- 2. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apuppt.
- 3. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.
- 4. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.

d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris					
1	Nama	:	Joko Dwi Purnomo Johanes			
	NIK*)	:	1608062106630001			
	Jabatan	:	Komisaris Utama			
	Tugas dan Tanggung Jawab					
	kegiatan usaha B b. Melaksanakan tanggung jawab c. Memastikan ba rekomendasi da jawab terhadap pengawasan De otoritas lainnya.	BPR di s pengav Direksi Ihwa D ari satu pelaksa ewan Ko	garanya penerapan Tata Kelola pada setiap seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. wasan terhadap pelaksanaan tugas dan i serta memberikan nasihat kepada Direksi. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan uan kerja atau pejabat yang bertanggung anaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil omisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau			
	d. Memberitahukai	n kepac	da Otoritas Jasa Keuangan:			

	1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang				
	keuangan dan perbankan; dan/atau				
	e. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan				
	kelangsungan usaha BPR.				
2	Nama : Chandra Kesuma				
	NIK*) : 1671040108600008				
	Jabatan : Komisaris				
	Tugas dan Tanggung Jawab				
	Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.				
	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.				
	3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.				
	 4. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 				
	5. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan				

e. berdasarkan Akta Notaris Nomor 46 Tanggal 10 Maret 2020 untuk komposisi pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat MUSI ARTA LESTARI adalah sebagai berikut:

dalam rapat Dewan Komisaris.

strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.

6. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan

Rp. jutaan

Νδ	Nama	Nominal	Nominal	Nominal
е		Sebelum Setor	Setor Modal	Setelah
		Modal		Setor Modal
1. ^a	PT CAHAYA AGUNG		1.000.000	1.000.000
а	MULIA			
2. n	S Basuki	400.000	520.000	920.000
3.	Drs. St. Sudarmadi	300.000	390.000	690.000
g 4. k	Paulus Hartanto,BA	300.000	390.000	690.000
JÜM a	LAH	1.000.000	1.300.000	3.300.000

- untuk modal inti minimum per akhir Desember 2020 adalah sebesar Rp.6.395.043.595,-
- f. Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper test)* atau untuk istilah sekarang adalah Uji Kemampuan dan Kepatutan (UKK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 7 Sumatera Selatan.
- g. Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan di PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari telah mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan (UKK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 7 Sumatera Selatan dan dinyatakan mampu.
- h. Sesama anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga, dan sesama anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun antara Dewan Komisaris dengan Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sehingga masing-masing pihak dapat bertindak independen.

2. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain

- a. Penghapusan kredit macet/writte off tahun 2020.
- b. Persetujuan pembagian tugas dan tanggungjawab Direksi dan karyawankaryawati perseroan.
- c. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk 5 (lima) tahun kedepan.
- d. Pemberitahuan kredit dengan plafond diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

3. Kelengkapan Pejabat Eksekutif Bank

Pejabat Eksekutif yang telah diangkat atau ditunjuk oleh Bank adalah sebagai berikut

Nama PE	Jabatan	Mulai Jabat	No. Surat Pengangkatan	Tanggal Surat	No. Surat Penegasan OJK	Tanggal Surat Penegasan
	Kepatuhan	05 Mei 2018	0867/DIR/BPR- MAL/V-013/2018	05 Mei 2018	S- 168/KR.0711/201 8	02 Juli 2018
Rita Winarni, SH	Manajemen Risiko	25 Sept 2017	1547/DIR/BPR- MAL/IX-148/2017	25 Sept 2017	S- 165/KR.0711/201 7	08 Nov 2017
	APU dan PPT	19 Feb 2020	0354/DIR/BPR- MAL/II-105/2020	19 Feb 2020	S- 125/KR.0711/20 20	08 April 2020
A. Kartikasari, A Md	Audit Intern	04 Mei 2018	0866/DIR/BPR MAL/V-012/2018	04 Mei 2018	S- 168/KR.0711/201 8	02 Juli 2018
P. Sutiono, SE	Teknologi Informasi	28 Mar 2018	0588/DIR/BPR MAL/III-204/2018	28 Mar 2018	S- 88/KR.071/2018	25 April 2018
Kuswita ,SE	Kabag Ops dan Umum	19 Feb 2020	0356/DIR/BPR- MAL/II-107/2020	19 Feb 2020	S- 125/KR.0711/20 20	08 April 2020
Palupi Gunardini, SE	Kabag Kredit	25 Sept 2017	1548/DIR/BPR- MAL/IX-149/2017	25 Sept 2017	S- 165/KR.0711/201 7	08 Nov 2017

dan semua telah dilaporkan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan KR 7 Sumatera bagian Selatan. Untuk Pengawas Intern Bank telah menunjuk pihak intern Bank dan bertindak secara independen dan dalam membuat laporan hasil pemeriksaan langsung pada Direktur Utama yang ditembuskan pada Komisaris Utama begitu juga untuk Manajemen Risiko Bank menunjuk dari intern yang bertindak secara independen dan tidak terlibat dalam operasional Bank. Para Pejabat Eksekutif tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga, kepengurusan dengan Dewan Komisaris dan Direksi sehingga mampu bertindak secara independen.

Secara struktur organisasi untuk Pengawas Intern berada dibawah langsung Direktur Utama sedangkan untuk APU dan PPT serta Manajemen Risiko dan Kepatuhan berada dibawah Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

B. Fungsi Pengawas Intern

- 1. Pelaksanaan fungsi Pengawas Intern yang dilaksanakan oleh auditor internal dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan dengan baik dan efektif.
- 2. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada berbasis risiko.
- Pengawas Intern dalam melakukan tugas pemeriksaan dilakukan mingguan, bulanan, semesteran dan juga tahunan. Hasil temuan dari pemeriksaan disampaikan pada bagian dan sama bagian dilakukan perbaikan.
- 4. Pengawas Intern melakukan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
- 5. Pengawas Intern menyampaikan laporan hasil pemeriksaanya pada Direktur Utama dan ditembuskan pada Komisaris Utama.

C. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan secara independen dan professional.
- Kantor Akuntan Publik telah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada PT. BPR
 Musi Arta Lestari tepat waktu serta hasil temua dari pemeriksaan telah
 ditindaklanjuti untuk diperbaiki oleh Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Musi
 Arta Lestari.

D. Penerapan Manajemen Risiko

Untuk Manajemen Risiko telah mulai diberlakukan dan PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari telah memiliki pejabat eksekutif yang membawahi manajemen risiko dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan KR 7 Sumatera Bagian Selatan. Tahun 2019 manajemen risiko telah membuat kebijakan dan prosedur mengenai hal ini.

Dalam melakukan penilaian profil risiko inheren termasuk dalam skala 3 (tiga) atau sedang. Standar operasi prosedur (SOP) untuk manajemen risiko telah dibuat dan telah dilaporkan ke OJK KR 7 Sumatera Bagian Selatan.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait *(related party)* dan Penyediaan Dana Besar atau BMPK

- a. PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari tidak melakukan pelanggaran atau melampaui ketentuan dalam hal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- b. PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari telah menyampaikan secara berkala laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan KR 7 Sumatera bagian Selatan bersamaan dengan Laporan Bulanan.
- c. Untuk debitur pihak terkait di PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari posisi per Desember 2020 adalah sebagai berikut,

No. Penyediaan Dana		Jui	Kolektibilitas		
140.	renyealac	an Bana	Debitur Nominal		Rolektioiitas
`1.	Kepada	pihak	1	Rp. 29.545.045,-	1
	terkait				

Rencana Strategis Bank Tahun 2021

A. Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari dalam pengembangan bisnis di tahun 2021 adalah antara lain,

- Fluktuatifnya harga komoditas pertanian (getah karet dan sawit) yang tidak stabil sehingga berdampak pada kewajiban nasabah dalam membayar kembali kewajibannya
- 2. Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- 3. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan kondisi tersebut di atas pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari jangka pendek akan difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk menimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada,

- a. Meningkatkan penyaluran/pertumbuhan kredit ke sektor UMKM yang potensial untuk dibiayai dengan target pertumbuhan 20% dan rasio *loan to deposit ratio* (LDR) sebesar 80% hal ini untuk memaksimalkan peran intermediasi PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari terhadap masyarakat/nasabah.
- b. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) akan tetap difokuskan pada metode jemput bola yang dilakukan oleh para petugas yang setiap hari berkeliling dan telah terjadwal. Untuk tahun 2021 akan ada penambahan wilayah baru yang diperkirakan daerah tersebut berpotensi untuk dijadikan sasaran.
- c. Melakukan penurunan *non perfoming loan* (NPL) kredit dengan rencana tindak yang akan dilakukan adalah, meningkatkan portofolio kredit melalui pencairan yang maksimal, melakukan penagihan kredit untuk kolek 3, 4 dan 5 serta yang diperkirakan berpotensi untuk manjadi bermasalah (terlambat angsuran), *writte off* dan AYDA.
- d. Memperbaiki rasio pendapatan terhadap biaya (BOPO).
- e. Mengikut sertakan Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan/karyawati untuk ikut program pelatihan yang diadakan oleh DPD Perbarindo SUMSEL BABEL, Otoritas Jasa Keuangan KR 7 SUMBAGSEL, maupun Lembaga lain yang melakukan penawaran pelatihan, hal ini untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian para karyawan.
- f. Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

B. Rencana Jangka Menengah

Untuk rencana jangka menengah ini Bank membagi menjadi 3 (tiga) rencana strategis, diantaranya

1. Bidang Pelayanan

Secara konsisten Bank ingin lebih mendekatkan pada nasabah maka khusus untuk bidang pelayanan akan meningkatkan lagi sistem jemput bola (berkunjung langsung ke nasabah) untuk DPK dan angsuran kredit sehingga nasabah tidak bersusah payah lagi ke Bank cukup nunggu di rumah atau lokasi usaha maka para petugas Bank yang akan mengambili Tabungan maupun setoran kredit atau dengan sistem pos-pos di setiap desa.

Dan yang paling penting lagi adalah membangun budaya pelayanan dan membangun prilaku pada seluruh karyawan dan memotivasinya untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan positif.

2. Bidang Keuangan

- a. Memaksimalkan pertumbuhan atau pencairan kredit baru dengan langkah yang akan ditempuh antara lain, ekspansi ke daerah yang potensial, memaksimalkan peranan dari bagian marketing, dan bila memungkinkan memberikan fee pada setiap karyawan yang mampu meraih target.
- b. Dampak lain dari pertumbuhan kredit yang maksimal adalah akan meningkatnya pendapatan Bank dan meminimalkan Biaya Operasional, karena rasio BOPO adalah cerminan dari efisiensi Bank bila mampu menekan biaya dan mampu meningkatkan pendapatan.

3. Bidang Sumber Daya Manusia

Peningkatan kesejahteraan karyawan untuk lebih diperhatikan lagi untuk lebih memotivasi karyawan supaya berprestasi dan mampu menciptakan laba yang maksimal maka hal ini perlu dilakukan selain kompensasi lain yang akan diberikan.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

- a. Bank telah menyampaikan Laporan Keuangan (laporan bulanan) melalui *web* Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
- b. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan melalui media massa lokal yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- c. Bank menyampaikan SLIK secara tepat waktu.

Kepemilikan Saham Direksi

A. Kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ahmad Shoim	1608062606790001	Nihil	Nihil
2	Sri Kusmiyati	1608066906680001	Nihil	Nihil

B. Kepemilikan saham anggota Direksi pada Perusahaan lain

			Sandi	Nama	Persentase
No	Nama Direksi	NIK*)	Bank	Perusahaan	Kepemilikan
			Lain*)**)	Lain	(%)
1	Ahmad Shoim	1608062606790001			Nihil
2	Sri Kusmiyati	1608066906680001			Nihil

Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank Perkreditan Rakyat

A. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

			Hubungan I	Keuangan**)	
No.	Nama Direksi	NIK*)	Anggota	nggota Anggota	
140.	Nama Direksi	NIK)	Direksi	Dewan	Saham
			Lain	Komisaris	
1	Ahmad Shoim	1608062606790001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Sri Kusmiyati	1608066906680001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

B. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

			Hubungan Keluarga**)			
No.	lo. Nama Direksi NIK*)		Anggota	Anggota	Pemegang	
NO.	Nama Direksi	NIK)	Direksi	Dewan	Saham	
			Lain	Komisaris		
1	Ahmad Shoim	1608062606790001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
2	Sri Kusmiyati	1608066906680001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

C. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Direks	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Joko Dv	i 1608062106630001	Nihil	Nihil
	Purnomo			
	Johanes			
2	Chandra	1671040108600008	Nihil	Nihil
	Kesuma			

D. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain

			Sandi	Nama	Persentase
No	Nama Direksi	NIK*)	Bank	Perusahaan	Kepemilikan
			Lain*)**)	Lain	(%)
1	Joko Dwi	1608062106630001			Nihil
	Purnomo				
	Johanes				
2	Chandra Kesuma	1671040108600008			Nihil

Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank Perkreditan Rakyat

C. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

			Hubungan Keuangan**)		
			Anggota	Anggota	Pemegang
No.	Nama Direksi	NIK*)	Dewan	Direksi	Saham
			Komisaris		
			Lain		
1	Joko Dwi	1608062106630001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Purnomo Johanes				
2	Chandra Kesuma	1671040108600008	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

D. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

			Hubungan Keluarga**)			
	Nama Dewan		Anggota	Anggota	Pemegang	
No.	Komisaris	NIK*)	Dewan	Direksi	Saham	
	Komisans		Komisaris			
			Lain			
1	Joko Dwi	1608062106630001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
	Purnomo Johanes					
2	Chandra Kesuma	1671040108600008	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari adalah independen.

Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1. Paket kebijakan remunerasi dan failitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi non natura (gaji dan tantiem) saja, selama 1 (satu) tahun adalah hanya berupa gaji saja sedangkan untuk yang berbetuk natura tidak dapat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini,

	Jenis	Direksi		Dewan Komisaris	
No.	Remunerasi	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
140.	(dalam 1 tahun)	Orang	Keseluruhan	Orang	Keseluruhan
			(Rp)		(Rp)
1	Gaji	2	57.670.500	2	27.888.000
2	Tunjangan	2	90.808.044	2	10.200.000
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi	-	Nihil	-	Nihil
	berbasis saham				
5	Remunerasi	-	-	-	-
	lainnya				
Total			148.478.544		38.088.000

Untuk tahun 2020 para Dewan Komisaris dan Direksi juga Karyawan tidak menerima remunerasi atau yang dipersamakan dengan itu, hal itu dilakukan untuk memperkuat permodalan dan untuk mengantisipasi bila kinerja ditahun 2021 tidak sesuai harapan.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasilan.

2. Uraian fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

	Jenis Fasilitas Lain	Uraian Fasilitas disertai dengan		
No	(dalam 1 tahun)	jumlah fasilitas (unit)		
		Direksi	Dewan Komisaris	
1	Perumahan			
2	Transportasi			
3	Asuransi Kesehatan			
4	Fasilitas lainnya			

Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif dan yang telah diputuskan dalam RUPS.

Rasio Gaji

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan *)	Perbandingan **)	
. Reterangun /	(a/b) : 1	
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.80 : 1	
Rasio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan Rasio gaji Direksi yang terendah (b)	1.22 : 1	
Rasio gaji Dekom yang tertinggi (a) dan Rasio gaji Dekom yang terendah (b)	1.76 : 1	
Rasio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan Rasio gaji Dekom yang tertinggi (b)	3.34 : 1	
Rasio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan Rasio gaji pegawai yang tertinggi (b)	1.23 : 1	

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	10 Februari 2020	2	a. Membahas RBB 2020
			b. Informasi dan kesepakatan
2	30 Maret 2020	2	Isu strategis BPR menghadapi <i>covid19</i>
3	04 Mei 2020	2	a. Membahas laporan bulan April 2020
			b. Isu strategis BPR
4	24 Juli 2020	2	a. Evaluasi RBB, Penetapan kebijakan
			strategis
			b. Informasi dan kesepakatan
5	21 September 2020	2	Review followup hasil pemeriksaan OJK
			tanggal 10 Februari sd 14 Februari dan
			tanggapan surat OJK 22 April 2020 atas hasil
			pemeriksaan umum PT BPR MAL
6	03 Nopember 2020	2	Informasi terkini dan kesepakatan

b. Kehadiran Dewan Komisaris

			Frekuensi	Kehadiran	Tingkat
No.	Nama	NIK*)	Fisik	telekonfren	Kehadiran **) (dalam%)
1	Joko Dwi Purnomo Johanes	1608062106630001	108	-	1800
2	Chandra Kesuma	1671040108600008	1	6	116.7

Jumlah Penyimpangan Internal (internal fraud)

Tahun 2020 tidak ada/tidak pernah terjadi Penyimpangan Internal *(internal fraud)* yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai Bank baik penyimpangan dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga (tabungan dan deposito) maupun penyaluran kredit yang bisa merugikan nasabah.

Jumlah		Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh						
penyimpangan internal *)	Dire	eksi	Del	com	Pegaw	ai tetap		ai tidak ap
(dalam 1 tahun)	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian**)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaian ***)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

Permasalahan Hukum

Permasalah hukum secara perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari sepanjang tahun 2020 tidak ada, baik yang berkaitan dengan penghimpunan dana pihak ketiga (tabungan dan deposito) maupun penyaluran kredit yang bisa merugikan nasabah.

Permasalahan hukum	Jumlah (satuan)			
i cimasalahan nakam	Perdata	Pidana		
Telah selesai (telah				
mempunyai kekuatan hukum	Nihil	Nihil		
yang tetap)				
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil		
Total	Nihil	Nihil		

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang memiliki benturan kepentingan			Pengambil keputusan			Jenis	Nilai transaksi	Keter-
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Transaksi	(jutaan	Angan**)
	rvarria	Jabatan	TVIK)	rvarria	Jabatan	14210		Rp)	
1									Nihil
2									Nihil
Dst.									Nihil

PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan sehingga sepanjang tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Pemberian dana untuk kepentingan sosial dan kegiatan politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari sepanjang tahun 2020 adalah hanya untuk kepentingan sosial saja dengan nominal Rp.1.500.000,- untuk lebih detilnya dapat di lihat pada table berikut ini,

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan (sosial/politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Nominal (dalam Rupiah)
1.	20 Jan 2020	Sosial	Uang duka atas meninggalnya Bapak Trisno Utomo orang tua Supriyani (karyawati PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari)	Sdri Supriyani	400.000,-
2.	21 Jan 2020	sosial	Uang duka atas meninggalnya mertua dari sdr Tri Budiyono (karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari)	Sdr Tri Budiyono	400.000,-
3.	04 Feb 2020	Sosial	Sumbangan dalam rangka MTQ	Sdr Wiki Pratama (ketua panitia)	200.000,-
4.	14 Feb 2020	Sosial	orang tua Rita Winarni (karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari)	Sdri Rita Winarni	400.000,-

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan (sosial/politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Nominal (dalam Rupiah)
5.	17 Juni 2020	Sosial	Partisipasi dalam rangka pembukaan Kantor Cabang PT Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia	Transfer Bank	300.000,-
6.	24 Nop 2020 Sosial		Sumbangan untuk hajatan nasabah	Sdr Sumaryadi (nasabah)	200.000,-
				TOTAL	1.500.000,-

Sedangkan untuk kegiatan politik PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari tidak pernah melakukan sumbangan yang sifat kegiatannya untuk politik karena PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari tidak berafiliasi ke parpol manapun juga.

Kesimpulan umum hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance

Berdasarkan hasil *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari periode Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai komposit *Good Corporate Governance* sebesar 2,38 dengan predikat Baik.
- b. Peringkat masing-masing per faktor adalah sebagai berikut:

No.	Aspek yang dinilai	Bobot (dalam %)	Peringkat	Nilai	
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20	1,66	0,43	
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15	1,52	0,27	
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	0	0	0	
4.	Penanganan benturan kepentingan	10	3,00	0,30	
5.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	10	2,47	0,28	
6.	Penerapan fungsi audit intern	10	1,83	0,19	
7.	Penerapan fungsi audit ekstern	0	2,00	0,05	
8.	Penerapan fungsi Manajemen Risiko dan pengendalian intern	10	2,94	0,29	
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.5	2,00	0,18	
10.	Rencana Bisnis Bank	7,5	3,00	0,23	
11.	Transparasi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.	10	2,00	0,15	
Nilai I	Composit	100%	17,24	2,38	
Predil	cat Komposit	BAIK			

Belitang-OKU Timur, 10 Mei 2021 DIREKSI

PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari

